

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana banjir di Nagari Lumpo, Kabupaten Pesisir Selatan secara keseluruhan masih tergolong kurang efektif, terutama jika dilihat dari tahap pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan sebelum bencana terjadi. Hal ini terlihat dari masih minimnya sosialisasi kebencanaan yang menyeluruh kepada masyarakat, belum optimalnya sistem peringatan dini banjir, serta kurangnya sarana dan prasarana pendukung mitigasi bencana yang tersedia di tingkat nagari. Selain itu, koordinasi antara BPBD dengan pemerintah nagari dan masyarakat setempat dalam upaya pencegahan bencana banjir juga belum berjalan secara maksimal, sehingga masyarakat masih sering terlambat dalam mengantisipasi datangnya banjir.

Namun demikian, jika ditinjau dari aspek penanganan pada saat tanggap darurat bencana, kinerja BPBD dapat dikatakan cukup efektif. Hal ini dibuktikan dengan respons yang relatif cepat dari petugas BPBD dalam melakukan evakuasi korban, penyaluran bantuan logistik, serta pendirian posko darurat ketika banjir terjadi di Nagari Lumpo. Koordinasi antara BPBD, aparat nagari, dan relawan pada saat kondisi darurat juga menunjukkan hasil yang cukup baik sehingga dampak kerugian yang lebih besar dapat diminimalisir. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa efektivitas BPBD dalam penanggulangan bencana banjir di Nagari Lumpo bersifat timpang antara tahap pra bencana yang masih lemah dengan tahap tanggap darurat yang sudah berjalan cukup baik.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar BPBD Kabupaten Pesisir Selatan lebih meningkatkan program sosialisasi dan edukasi kebencanaan secara berkala kepada masyarakat Nagari Lumpo agar tingkat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi banjir semakin meningkat. BPBD juga perlu memperkuat sistem peringatan dini banjir serta melengkapi sarana dan prasarana mitigasi bencana yang masih minim di tingkat nagari. Selain itu, perlu dibangun koordinasi yang lebih intensif dan berkelanjutan antara BPBD, pemerintah nagari, dan masyarakat, tidak hanya pada saat tanggap darurat tetapi juga pada tahap pencegahan dan mitigasi, sehingga kesenjangan efektivitas antara tahap pra bencana dan tahap tanggap darurat dapat diminimalisir. Pemerintah nagari diharapkan pula dapat lebih proaktif dalam mengalokasikan anggaran serta membentuk kelompok siaga bencana di tingkat lokal guna mendukung tugas BPBD secara berkelanjutan (Suhardjo, 2015)

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Antara News Sumbar. (2025). Banjir rendam 1.459 rumah di Batang Kapas Pesisir Selatan Sumbar. Diakses dari <https://sumbar.antaranews.com/berita/653378/banjir-rendam-1459-rumah-di-batang-kapas-pesisir-selatan-sumbar>
- Antara News. (2023, 15 Agustus). BPBD siaga banjir di Kabupaten Pesisir Selatan meski telah surut. Diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/3682425/bpbd-siaga-banjir-di-kabupaten-pesisir-selatan-meski-telah-surut>
- Antara Sumatera Barat. (2025). Bencana Banjir Pesisir Selatan: 4.256 Rumah Terendam, 21.280 Jiwa Terdampak, 1 Warga Meninggal Dunia. Tersedia pada: <https://sumbar.antaranews.com/berita/729889/bencana-banjir-pesisir-selatan-4256-rumah-terendam-21280-jiwa-terdampak-1-warga-meninggal-dunia>
- Antara Sumatera Barat. (2026). BPBD Sumatera Barat Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Pesisir Selatan. Tersedia pada: <https://sumbar.antaranews.com/berita/646738/bpbd-sumatera-barat-salurkan-bantuan-untuk-korban-banjir-di-pesisir-selatan>
- Ariansyah, T. (2022). Efektivitas Kebijakan Penanggulangan Pra Bencana Banjir Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*.
- Asyikin, Nur. 2021. "Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi dalam Penggunaan Diskresi." *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 50 No. 3: 633-645.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2019). *Rencana nasional penanggulangan bencana tahun 2020–2024*. Jakarta: BNPB.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2020). *Data dan informasi bencana Indonesia*. Jakarta: BNPB.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). (t.t.). *Analisis dan Evaluasi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*

- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). (t.t.). Analisis dan Evaluasi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- BNPB. (2012). *Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana*. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- BPBD Kabupaten Pesisir Selatan. 2024. *Laporan Tahunan Data Kebencanaan dan Peta Rawan Bencana Banjir Kabupaten Pesisir Selatan*. Painan: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- BPBD Provinsi Jawa Tengah. (t.t.). Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- Pesisir Selatan. (2020). Penduduk Kecamatan IV Jurai Menurut Jenis Kelamin per Nagari (Data Kependudukan Bersih Semester 2 Tahun 2019).
- Efendi, R. (2018). *Rekonstruksi Kelembagaan Manajemen Bencana Pasca Tsunami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadid, A. N. (2019). "Politik Anggaran Penanggulangan Bencana: Studi Kasus Alokasi APBD di Daerah Rawan Bencana." *Jurnal Kebijakan Publik & Administrasi Negara*, 15(2), 112–128.
- Kelsen, Hans. (2006). *General Theory of Law and State* (Terjemahan Somardi). Jakarta: BEE Media Indonesia.
- Kharisma, D., & Yuniningsih, T. (t.t.). *Efektivitas organisasi dalam penyelenggaraan pelayanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang*. Jurnal Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.
- Kusumasari, B. (2014). *Manajemen bencana dan kapabilitas pemerintah lokal*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mertokusumo, Sudikno. (2020). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka.
- Muzdalifah, S., Mafriana, S. B., Sompia, A. T., & Attijani, M. K. (2023). *Efektivitas Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi dalam Penanggulangan Banjir di Kalimantan Selatan*. Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial, 8(2), 238–249. <https://doi.org/10.33506/jn.v8i2.1898>

Nabila, M. P., Tanjung, M. R., Nasution, N. A., Abelia, & Usiono. (2026). *Efektivitas Pengawasan Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (Studi Kasus Banjir Bandang Sumatera Utara 2025)*.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. (2021). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026*. Painan: Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. (2024). *Banjir dan Longsor Terjang Pesisir Selatan*.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. (2024). *Penanganan bencana hidrometeorologi daerah dan luar negeri*.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. (2025). Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan, Fungsi, Tugas, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. (2025). Peraturan Daerah tentang Perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Pesisir Selatan. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Pesisir Selatan.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. (2025). *Sebanyak 72 nagari di Pesisir Selatan berada pada zona merah tsunami*.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. (2025). Update Data Terkini: 21 Ribu Warga Terdampak, Kerugian Pesisir Selatan Melonjak ke Rp147,6 Miliar.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. (t.t.). *Pessel dilanda banjir bandang*. Diakses dari <https://www.pessel.pesisirselatankab.go.id/berita/pessel-dilanda-banjir-bandang>

Pemerintah Nagari Air Haji Barat. (2025). BPBD Sumbar: Banjir di Pesisir Selatan Rendam Puluhan Rumah.

Pemerintah Nagari Lumpo. (2021). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Lumpo Tahun 2021-2027*. Pesisir Selatan: Sekretariat Kantor Wali Nagari Lumpo.

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Pramono, R. (2016). "Perspektif Sosiologis dalam Memahami Bencana di Indonesia." *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 18(1), 89–104.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi Keempat). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Puspita, N. Y., & Sembiring, F. (2024). Kewenangan Hukum BPBD dalam Penanggulangan Bencana. *Jurnal Paradigma*, 9(2). Tersedia pada: <https://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/paradigma/article/download/5841/2678/24315>

Putri, A. A. S., & Noer, K. U. (2022). Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi dalam Penanggulangan Pra Bencana Banjir. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(12), 17218-17228. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i12.10654>

Rahardjo, Satjipto. (2009). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Ramli, S. (2010). *Pedoman Praktis Manajemen Bencana (Disaster Management)*. Jakarta: Dian Rakyat.

Ranah Warta. (2025, 4 Desember). Peduli bencana, PT MSL kirim bantuan kebutuhan pokok ke Pusdalops BPBD. Diakses dari <https://ranahwarta.com/daerah/kab-pesisir-selatan/peduli-bencana-pt-msl-kirim-bantuan-kebutuhan-pokok-ke-pusdalops-bpbd/>

Redaksi Kompas Nagari. (2024). Pesisir Selatan di Kepung Banjir dan Longsor. Tersedia pada: <https://kelola.kim.id/~130108200301/berita/read/pesisir-selatan-di-kepung-banjir-da20690-130108200301/58>

Republik Indonesia. (2005). Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana. Jakarta. Marbun, S. F. (2018). *Hukum Administrasi Negara: Teori dan Praktis Kelembagaan Publik*. Yogyakarta: FH UII Press.

Republik Indonesia. (2007). Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39901/Undang-undang-no-24-tahun-2007>

- Sidiq, M. (2019). *Struktur Organisasi Pemerintah Daerah dan Dinamika Otonomi*. Depok: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Steers, R. M. (1985). *Efektivitas organisasi* (dikutip dalam Kharisma & Yuniningsih). Jakarta: Erlangga.
- Sugeng, R. S. (2019). *Manajemen penanggulangan bencana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suhardjo, D. (2011). Arti penting pendidikan pengurangan risiko bencana keterkaitannya dengan kelembagaan prasekolah. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 30(2), 175-187.
- Syafruddin, A. (2021). *Hukum Administrasi Negara dan Fungsi Koordinasi Lembaga Pemerintah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarif, M. (2020). *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Penanggulangan Bencana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Totabuanews Sumbar. (2024, 30 April). *BPBD Pesisir Selatan siaga, masyarakat diminta waspada potensi cuaca buruk dan bencana*. Diakses dari <https://sumbar.totabuan.news/kab-pesisir-selatan/bpbd-pesisir-selatan-siaga-masyarakat-diminta-waspada-potensi-cuaca-buruk-dan-bencana/>
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587*.
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Wibowo, A. (2022). "Restrukturisasi Kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Aspek Collaborative Governance." *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 15(2), 112-125.